



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PENGUMUMAN

NOMOR: 800.1.2.2/15191 /BKD-II

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka alokasi formasi sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) formasi **Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)**, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JUMLAH ALOKASI FORMASI DAN UNIT KERJA PENEMPATAN

Kualifikasi Pendidikan bagi Jabatan Tenaga Kesehatan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024 atau pada laman <https://bit.ly/KualifikasiPendidikanNakes2024>

Tenaga Kesehatan

No.	Nama Jabatan	Nama Sub Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
1	Dokter Ahli Muda	Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Ginjal Hipertensi	1	-	RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK	SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM - GINJAL HIPERTENSI
2	Dokter Ahli Muda	Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Endokrin Metabolik dan Diabetes	1	-	RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK	SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM - ENDOKRINOLOGI METABOLIK DAN DIABETES

Tenaga Kesehatan

No.	Nama Jabatan	Nama Sub Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
3	Dokter Ahli Muda	Dokter Sub Spesialis Anak-Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA)	1	-	RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK	SUBSPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK - EMERGENSI DAN RAWAT INTENSIF ANAK
4	Dokter Ahli Muda	Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Gastroenterohepatologi	1	-	RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK	SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM - GASTROENTEROHEPATOLOGI
5	Dokter Ahli Muda	Dokter Sub Spesialis Anak-Neonatologi	1	-	RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK	SUBSPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK - NEONATOLOGI
6	Dokter Ahli Muda	Dokter Sub Spesialis Neurologi-Neurovaskular, Neurointervensi, Imaging, Otologi, Oftalmologi	1	-	RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK	SUBSPESIALIS NEUROLOGI - NEUROVASKULAR, INTERVENSI, OTOLOGI PENCITRAAN, OFTALMOLOGI
7	Dokter Ahli Muda	Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Reumatologi	1	-	RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK	SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM - REUMATOLOGI
8	Dokter Ahli Muda	Dokter Sub Spesialis Obgyn- Fetomaternal (KFM)	1	-	RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK	SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI - KEDOKTERAN FETOMATERNAL
9	Dokter Ahli Muda	Dokter Sub Spesialis Obgyn- Onkologi Ginekologi (KONk)	1	-	RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK	SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI - ONKOLOGI GINEKOLOGI
10	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular	2	-	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN - RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO BIDANG PELAYANAN MEDIK - RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO	DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS, KARDIAK DAN VASKULAR
11	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	1	-	RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN - RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM BIDANG PELAYANAN MEDIS	DOKTER SPESIALIS ANESTESI / SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
12	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	-	DINAS KESEHATAN RSUD KORPRI SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	SPESIALIS PATOLOGI KLINIK

Tenaga Kesehatan

No.	Nama Jabatan	Nama Sub Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
13	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri	1	-	RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK	DOKTER SPESIALIS KEJIWAAN / SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA
14	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Anak	1	-	DINAS KESEHATAN RSUD KORPRI SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	DOKTER SPESIALIS ANAK
15	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Mata	5	-	DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	DOKTER SPESIALIS MATA
16	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	-	RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN - RSUD ATMA HUSADA MAHAKAM BIDANG PELAYANAN MEDIS	SPELIALIS PATOLOGI KLINIK
17	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	2	-	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN - RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO BIDANG PELAYANAN MEDIK - RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO	DOKTER SPESIALIS ANESTESI / SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
18	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Anak	1	-	RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN - RSUD ATMA HUSADA MAHAKAM BIDANG PELAYANAN MEDIS	DOKTER SPESIALIS ANAK
19	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Radiologi	1	-	RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE WAKIL DIREKTUR PENUNJANG BIDANG PENUNJANG MEDIK	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI
20	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik	1	-	RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE WAKIL DIREKTUR PENUNJANG BIDANG PENUNJANG MEDIK	SPELIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK
21	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	1	-	DINAS KESEHATAN RSUD KORPRI SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	SPELIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
22	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	1	-	RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN - RSUD ATMA HUSADA MAHAKAM BIDANG PELAYANAN MEDIS	DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIS

Tenaga Kesehatan

No.	Nama Jabatan	Nama Sub Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
23	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Bedah (Umum)	1	-	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN - RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO BIDANG PELAYANAN MEDIK	SPESIALIS BEDAH
24	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	-	RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN - RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM BIDANG PELAYANAN MEDIS	SPESIALIS PENYAKIT DALAM
25	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Mata	2	-	RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK	DOKTER SPESIALIS MATA
26	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik	1	-	DINAS KESEHATAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN SEKSI PELAYANAN	SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK
27	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	1	-	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN - RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO BIDANG PELAYANAN MEDIK - RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO	SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI
28	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Anak	1	-	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN - RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO BIDANG PELAYANAN MEDIK - RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO	DOKTER SPESIALIS ANAK
29	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	-	DINAS KESEHATAN RSUD KORPRI SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	SPESIALIS PENYAKIT DALAM
30	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Kedokteran Forensik & Medikolegal	1	-	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO WAKIL DIREKTUR PENUNJANG - RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO BIDANG PENUNJANG MEDIK - RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO	DOKTER SPESIALIS FORENSIK / SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL
31	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1	-	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN - RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO BIDANG PELAYANAN MEDIK - RSUD DR. KANUJOSO	SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

Tenaga Kesehatan

No.	Nama Jabatan	Nama Sub Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
					DJATIWIBOWO	
32	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Bedah Saraf	1	-	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN - RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO BIDANG PELAYANAN MEDIK - RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO	SPELIALIS BEDAH SARAF
33	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	1	-	DINAS KESEHATAN RSUD KORPRI SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIS / SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI
34	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	1	-	DINAS KESEHATAN RSUD KORPRI SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	DOKTER SPESIALIS ANESTESI / SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
35	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	1	-	RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE WAKIL DIREKTUR PENUNJANG BIDANG PENUNJANG MEDIK	DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIS / SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI
36	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Radiologi	1	-	DINAS KESEHATAN RSUD KORPRI SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI
37	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri	2	-	RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN - RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM BIDANG PELAYANAN MEDIS	SPELIALIS PSIKIATRI / DOKTER SPESIALIS KEJIWAAN / SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA
38	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Bedah (Umum)	1	-	DINAS KESEHATAN RSUD KORPRI SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	SPELIALIS BEDAH
39	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri	1	-	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN - RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO BIDANG PELAYANAN MEDIK - RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO	SPELIALIS KEDOKTERAN JIWA / DOKTER SPESIALIS KEJIWAAN

Tenaga Kesehatan

No.	Nama Jabatan	Nama Sub Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
40	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Radiologi	1	-	RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN - RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM BIDANG PELAYANAN MEDIS	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI
41	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	-	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO WAKIL DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN - RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO BIDANG PELAYANAN MEDIK - RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO	SPEKIALIS PENYAKIT DALAM
Total Formasi			49	0		

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
1	Auditor Ahli Pertama	Fungsional	6	-	INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN BIDANG KHUSUS	S-1 ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN / D-IV MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV ADMINISTRASI PAJAK / S-1 STATISTIKA
2	Auditor Ahli Pertama	Fungsional	6	-	INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN BIDANG PEREKONOMIAN	S-1 ILMU POLITIK / D-IV MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI / D-IV ADMINISTRASI PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 STATISTIKA
3	Auditor Ahli Pertama	Fungsional	6	-	INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR	S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV ADMINISTRASI PAJAK / D-IV ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 STATISTIKA / D-IV MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU POLITIK
4	Auditor Ahli Pertama	Fungsional	6	-	INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / D-IV AKUNTANSI

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
5	Instruktur Ahli Pertama	Fungsional	6	-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI UPT BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN SEKSI PENYELENGGARAAN PELATIHAN	S-1 TEKNIK MESIN / S-1 REKAYASA MESIN / S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK / S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK / S-1 TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA / S-1 REKAYASA ELEKTRO / S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 PARIWISATA / D-IV PRODUKSI GARMEN / S-1 TEKNIK KELAUTAN
6	Manggala Informatika Ahli Pertama	Fungsional	1	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER JARINGAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 INFORMATIKA / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI
7	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Fungsional	2	-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BIDANG PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMSOS T. KERJA	S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI / S-1 SAINS KOMUNIKASI / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN / S-1 SAINS POLITIK / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV RELASI INDUSTRI / S-1 ILMU POLITIK
8	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	Fungsional	3	-	DINAS PU, PENATAAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT BIDANG BINA KONSTRUKSI SEKSI PEMBERDAYAAN DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV ILMU INFORMATIKA / D-IV HUKUM / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
9	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Fungsional	2	-	DINAS PU, PENATAAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 DESAIN INTERIOR / D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG / D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN
10	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	Fungsional	2	-	DINAS PU, PENATAAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT BIDANG BINA MARGA SEKSI PERENCANAAN BINA MARGA	S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK MATERIAL / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN / S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA / S-1 TEKNIK PLANOLOGI
11	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	Fungsional	2	-	DINAS PU, PENATAAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT BIDANG CIPTA KARYA	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN
12	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	Fungsional	2	-	DINAS PU, PENATAAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT BIDANG BINA MARGA SEKSI JALAN	D-III TEKNIK SIPIL / D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-III TEKNIK PERANCANGAN MEKANIK / D-III KONSTRUKSI SIPIL
13	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Terampil	Fungsional	1	-	DINAS PU, PENATAAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT BIDANG CIPTA KARYA SEKSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK LINGKUNGAN
14	Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil	Fungsional	2	-	DINAS PU, PENATAAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT BIDANG SUMBER DAYA AIR SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR	D-III TEKNIK SIPIL

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
15	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama	Fungsional	9	1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI / D-IV SANITASI LINGKUNGAN / S-1 REKAYASA TEKSTIL / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK / S-1 REKAYASA FISIKA / S-1 REKAYASA GEODESI / S-1 REKAYASA GEOMATIKA / S-1 REKAYASA KIMIA / S-1 REKAYASA LINGKUNGAN / S-1 REKAYASA MATERIAL / S-1 REKAYASA MESIN / S-1 REKAYASA PERTAMBANGAN / S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK BIOSISTEM / S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / S-1 REKAYASA MANUFAKTUR / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN / S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK / S-1 REKAYASA MEKATRONIKA / S-1 TEKNIK SISTEM ENERGI / D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 REKAYASA BIOMEDIS / S-1 REKAYASA SIPIL / S-1 REKAYASA SUMBER DAYA AIR / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK KELAUTAN
16	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	Fungsional	3	-	INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR	S-1 MANAJEMEN REKAYASA / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 HUKUM / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
17	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	Fungsional	3	-	INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN BIDANG PEREKONOMIAN	S-1 MANAJEMEN REKAYASA / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 HUKUM / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
18	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	Fungsional	3	-	INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN BIDANG KHUSUS	S-1 MANAJEMEN REKAYASA / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 HUKUM / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
19	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	Fungsional	3	-	INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	S-1 MANAJEMEN REKAYASA / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 HUKUM / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
20	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Fungsional	4	-	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	S-1 AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL / D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV ANALISIS KEUANGAN / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / D-IV BISNIS DIGITAL / D-IV INTELIJEN TEKNOLOGI / D-IV KEAMANAN DAN INTELIJEN SIBER / D-IV KEAMANAN EKONOMI DAN INTELIJEN KEUANGAN / D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN AGRIBISNIS / D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK / D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN / D-IV PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT / D-IV PERADILAN PIDANA / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV RELASI INDUSTRI / D-IV STUDI INTELIJEN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN / S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT / S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 ARKEOLOGI / S-1 ARSITEKTUR / S-1 ASTRONOMI / S-1 BOKIMIA / S-1 BIOLOGI / S-1 BISNIS / S-1 EKONOMI / S-1 ENTOMOLOGI / S-1 FARMASI / S-1 FILSAFAT / S-1 FISIKA / S-1 GEOFISIKA / S-1 GEOLOGI / S-1 GIZI / S-1 HUBUNGAN

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
						INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ATMOSFER DAN KEPLANETAN / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 ILMU PANGAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU TANAH / S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 KEUANGAN ISLAM / S-1 KEWIRAUSAHAAN / S-1 KIMIA / S-1 KLIMATOLOGI / S-1 KRIMINOLOGI / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 METEOROLOGI / S-1 MIKROBIOLOGI / S-1 OSEANOGRAFI / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL / S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH / S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI / S-1 PENDIDIKAN ANTROPOLOGI / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN BISNIS / S-1 PENDIDIKAN EKONOMI / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI / S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM / S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL / S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN MUSIK / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 PERDAGANGAN INTERNASIONAL / S-1 PETERNAKAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SIPIL / S-1 SAINS KOMUNIKASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK MESIN /

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
						S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK MATERIAL / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 USAHA KOPERASI / S-1 TEKNOLOGI PANGAN
21	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	Fungsional	3	-	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT BIDANG SUMBER DAYA AIR SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK PENGAIRAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 TEKNIK PLANOLOGI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK KELAUTAN / D-IV TEKNIK PENGAIRAN / D-IV TEKNIK SIPIL
22	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Fungsional	1	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / D-IV PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
23	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Fungsional	1	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim	D-IV PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL / S-1 ANTROPOLOGI BUDAYA / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM
24	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Fungsional	1	-	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI	S-1 HUKUM
25	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 INFORMATIKA
26	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT	D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU INFORMASI / S-1 INFORMATIKA
27	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	2	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	S-1 ADMINISTRASI / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN / D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
28	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	2	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	S-1 EKONOMI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 HUKUM SUMBER DAYA ALAM / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN / D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER
29	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEKRETARIAT	S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ADMINISTRASI NEGARA
30	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	2	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN / S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI
31	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SEKRETARIAT	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN / D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
32	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 STATISTIK / D-IV PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT
33	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	2	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 REKAYASA SIPIL / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI
34	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	-	DINAS PARIWISATA SEKRETARIAT	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PARIWISATA / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 INFORMATIKA
35	Polisi Kehutanan Ahli Pertama	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP KENDILO	S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 LINGKUNGAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN / S-1 ILMU KEHUTANAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN / S-1 PENGELOLAAN HUTAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / S-1 TEKNIK KEHUTANAN / S-1 BUDIDAYA HUTAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN DAN EKOWISATA / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
36	Polisi Kehutanan Ahli Pertama	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP BERAU BARAT SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 LINGKUNGAN / S-1 ILMU KEHUTANAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN / S-1 PENGELOLAAN HUTAN / S-1 TEKNIK KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN / S-1 BUDIDAYA HUTAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN DAN EKOWISATA / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN
37	Polisi Kehutanan Ahli Pertama	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP DAMAI SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 LINGKUNGAN / S-1 ILMU KEHUTANAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 PENGELOLAAN HUTAN / S-1 TEKNIK KEHUTANAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN / S-1 BUDIDAYA HUTAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN
38	Polisi Kehutanan Ahli Pertama	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHL BATU ROOK SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 LINGKUNGAN / S-1 ILMU KEHUTANAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / S-1 PENGELOLAAN HUTAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN DAN EKOWISATA / S-1 GEOGRAFI

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
39	Polisi Kehutanan Ahli Pertama	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN BIDANG PERLINDUNGAN DAN KSDAE	S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 LINGKUNGAN / S-1 ILMU KEHUTANAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN / S-1 PENGELOLAAN HUTAN / S-1 TEKNIK KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN / S-1 BUDIDAYA HUTAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN DAN EKOWISATA / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN
40	Polisi Kehutanan Ahli Pertama	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP SANTAN SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 LINGKUNGAN / S-1 ILMU KEHUTANAN / S-1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN / S-1 PENGELOLAAN HUTAN / S-1 TEKNIK KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN / S-1 BUDIDAYA HUTAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN DAN EKOWISATA / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
41	Polisi Kehutanan Ahli Pertama	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP BATU AYAU SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 LINGKUNGAN / S-1 ILMU KEHUTANAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN / S-1 PENGELOLAAN HUTAN / S-1 TEKNIK KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN / S-1 BUDIDAYA HUTAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN DAN EKOWISATA / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN
42	Polisi Kehutanan Ahli Pertama	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP MERATUS SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 LINGKUNGAN / S-1 ILMU KEHUTANAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN / S-1 PENGELOLAAN HUTAN / S-1 TEKNIK KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN / S-1 BUDIDAYA HUTAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN DAN EKOWISATA / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
43	Polisi Kehutanan Ahli Pertama	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP BONGAN SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 LINGKUNGAN / S-1 ILMU KEHUTANAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN / S-1 PENGELOLAAN HUTAN / S-1 TEKNIK KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN / S-1 BUDIDAYA HUTAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN DAN EKOWISATA / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN
44	Polisi Kehutanan Ahli Pertama	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP TELAKE SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 LINGKUNGAN / S-1 ILMU KEHUTANAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN / S-1 PENGELOLAAN HUTAN / S-1 TEKNIK KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN / S-1 BUDIDAYA HUTAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
45	Polisi Kehutanan Pemula	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP TELAKE SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	SMK KEHUTANAN
46	Polisi Kehutanan Pemula	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD TAHURA BUKIT SOEHARTO SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	SMK KEHUTANAN
47	Polisi Kehutanan Pemula	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP BATU AYAU SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	SMK KEHUTANAN

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
48	Polisi Kehutanan Pemula	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP MANUBAR SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	SMK KEHUTANAN
49	Polisi Kehutanan Pemula	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP KENDILO SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	SMK KEHUTANAN
50	Polisi Kehutanan Pemula	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP DELTA MAHAKAM SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	SMK KEHUTANAN
51	Polisi Kehutanan Pemula	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHL BATU ROOK SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	SMK KEHUTANAN
52	Polisi Kehutanan Pemula	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP BERAU BARAT SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	SMK KEHUTANAN
53	Polisi Kehutanan Terampil	Fungsional	2	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP BERAU UTARA SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI / D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III KEHUTANAN
54	Polisi Kehutanan Terampil	Fungsional	2	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP BONGAN SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI / D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III KEHUTANAN

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
55	Polisi Kehutanan Terampil	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP BERAU PANTAI SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI / D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III KEHUTANAN
56	Polisi Kehutanan Terampil	Fungsional	2	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP DAMAI SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI / D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III KEHUTANAN
57	Polisi Kehutanan Terampil	Fungsional	2	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP MERATUS SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI / D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III KEHUTANAN
58	Polisi Kehutanan Terampil	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP TELAKE SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI / D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III KEHUTANAN
59	Polisi Kehutanan Terampil	Fungsional	2	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP KENDILO SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI / D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III KEHUTANAN
60	Polisi Kehutanan Terampil	Fungsional	2	-	DINAS KEHUTANAN BIDANG PERLINDUNGAN DAN KSDAE	D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI / D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III KEHUTANAN

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
61	Polisi Kehutanan Terampil	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP MANUBAR SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI / D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III KEHUTANAN
62	Polisi Kehutanan Terampil	Fungsional	2	-	DINAS KEHUTANAN UPTD TAHURA BUKIT SOEHARTO SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI / D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III KEHUTANAN
63	Polisi Kehutanan Terampil	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP BERAU BARAT SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI / D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III KEHUTANAN
64	Polisi Kehutanan Terampil	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP DELTA MAHAKAM SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI / D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III KEHUTANAN
65	Polisi Kehutanan Terampil	Fungsional	2	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP BATU AYAU SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI / D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III KEHUTANAN
66	Polisi Kehutanan Terampil	Fungsional	2	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHP SANTAN SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI / D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III KEHUTANAN

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
67	Polisi Kehutanan Terampil	Fungsional	1	-	DINAS KEHUTANAN UPTD KPHL BATU ROOK SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI / D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III KEHUTANAN
68	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Fungsional	3	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 SAINS POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI
69	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Fungsional	2	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 SAINS POLITIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK
70	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Fungsional	10	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SAINS POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI
71	Polisi Pamong Praja Pemula	Fungsional	30	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	SLTA/SMA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)
72	Polisi Pamong Praja Pemula	Fungsional	10	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) / SLTA KEJURUAN / SLTA/SMA SEDERAJAT
73	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	2	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER / D-IV SISTEM SIBER-FISIK / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
74	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	1	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK / D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER / D-IV SISTEM SIBER-FISIK / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA ELEKTRO / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SAINS KOMPUTASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI
75	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT SUBBAG UMUM	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III TEKNOLOGI PERMAINAN / D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS
76	Statistisi Ahli Pertama	Fungsional	3	2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG STATISTIK	S-1 STATISTIKA / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 MATEMATIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 SAINS DATA SPASIAL / S-1 STATISTIKA TERAPAN
77	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	Fungsional	2	-	DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT BIDANG PENATAAN RUANG	D-IV TEKNOLOGI SURVEI PEMETAAN DASAR / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Teknis Umum

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Formasi Umum	Formasi Disabilitas	Unit Penempatan	Pendidikan Nama
78	Widyaiswara Ahli Pertama	Fungsional	4	-	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA UPT BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	S-2 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-2 EKONOMI PERTANIAN / S-2 PENGENDALIAN HAMA TERPADU / S-2 AGROTEKNOLOGI / S-2 REKAYASA PERTANIAN DAN BIOSISTEM / S-2 PERTANIAN BERKELANJUTAN / S-2 BIOTEKNOLOGI PERTANIAN / S-2 PERTANIAN LAHAN KERING / S-2 MIKROBIOLOGI PERTANIAN / S-2 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN / S-2 TEKNIK PERTANIAN / S-2 SAINS PERTANIAN / S-2 BIOENERGI PERTANIAN / S-2 ENTOMOLOGI PERTANIAN / S-2 PENYULUHAN PERTANIAN / S-2 PERTANIAN TROPIKA BASAH / S-2 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-2 REKAYASA INDUSTRI PERTANIAN / S-2 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-2 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN / S-2 ILMU PERTANIAN
79	EDUKATOR	Pelaksana	1	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPT MUSEUM MULAWARMAN SEKSI KOLEKSI DAN BIMBINGAN	S-1 TATA KELOLA SENI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SENI MURNI / S-1 SENI RUPA / S-1 ARKEOLOGI / S-1 ILMU SEJARAH / S-1 SENI PERTUNJUKAN
80	KONSERVATOR	Pelaksana	1	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPT MUSEUM MULAWARMAN SEKSI KONSERVASI DAN PREPARASI	S-1 KIMIA / S-1 ARKEOLOGI / S-1 BIOLOGI / S-1 GEOLOGI / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK SIPIL
81	KURATOR	Pelaksana	1	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPT MUSEUM MULAWARMAN SEKSI KOLEKSI DAN BIMBINGAN	S-1 ARKEOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 ILMU SEJARAH / S-1 SENI PERTUNJUKAN
82	PENATA PAMERAN	Pelaksana	1	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPT MUSEUM MULAWARMAN SEKSI KONSERVASI DAN PREPARASI	SMK DESAIN GRAFIS / SMK MULTIMEDIA / SMK TEKNIK BANGUNAN/MULTIMEDIA/DESAIN GRAFIS
83	REGISTRAR	Pelaksana	1	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPT MUSEUM MULAWARMAN SEKSI KOLEKSI DAN BIMBINGAN	D-III SASTRA INDONESIA / D-III KOMUNIKASI BROADCASTING / D-III SEJARAH / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III AKUNTANSI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III ILMU KOMUNIKASI / D-III SASTRA DAERAH
Total Formasi			207	5		

B. PERSYARATAN

1. Syarat Umum :

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Usia paling rendah **18 (delapan belas)** tahun dan paling tinggi **35 (tiga puluh lima)** tahun pada saat melamar dikecualikan bagi pelamar jabatan **Dokter Spesialis Usia paling tinggi 40 (empat puluh)** tahun pada saat melamar;
- c. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
- d. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- e. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/PPP/Calon Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- f. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/POLRI, atau anggota TNI/POLRI;
- g. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- h. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- i. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah yang wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir. Khusus bagi pelamar Penyandang Disabilitas wajib melampirkan Surat Keterangan Disabilitas dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
- j. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya. (Surat Keterangan Bebas Narkoba/ NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
- k. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- l. Bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan pindah antar instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS ;
- m. Pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat Tindakan pelanggaran seleksi;
 2. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
 3. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan CPNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb (mekanisme dan format surat usulan terlampir).

2. Syarat Khusus :

- a. Lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis dalam ijazah;

- b. Lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib memiliki Surat Penyetaraan Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi;
- c. Pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
 - 1. Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan Jenis dan Derajat kedisabilitasnya; dan
 - 2. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar;
 - 3. Link video singkat tersebut diatas disampaikan kepada panitia melalui laman form <https://bit.ly/FormDisabilitasCASN2024>.
- d. Ketentuan jenis syarat wajib tambahan persyaratan lamaran / administrasi diperuntukkan khusus bagi jabatan sebagai berikut :
 - 1. Bagi Formasi Jabatan **Ahli Pertama dan Pemula - Polisi Pamong Praja**
 - a. Diwajibkan memiliki tinggi badan **minimal 160 cm bagi Pria dan 155 cm bagi Wanita** yang akan dibuktikan ketika pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan;
 - b. Pelamar wajib membuat Surat Pernyataan Sehat yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 yang akan dilengkapi dan dibawa ketika pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan (format terlampir).
 - 2. Bagi Formasi Jabatan **Ahli Pertama / Terampil / Pemula - Polisi Kehutanan**
 - a. Diwajibkan memiliki tinggi badan **minimal 165 cm bagi Pria dan 160 cm bagi Wanita** yang akan dibuktikan pada pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan;
 - b. Diwajibkan melampirkan **Surat Keterangan Bebas Buta Warna** yang diterbitkan oleh Puskesmas / Rumah Sakit / Fasilitas Kesehatan lain milik Pemerintah atau Dokter Pemerintah dan akan dibuktikan kembali pada Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan;
 - c. Pelamar wajib membuat Surat Pernyataan Sehat yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 yang akan dilengkapi dan dibawa ketika pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan (format terlampir).

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Ketentuan Umum Pelamar CPNS

- a. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai proses pengunggahan dokumen yang di persyaratkan secara elektronik;
- b. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada angka (1) hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal pembukaan seleksi CASN;
- c. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis formasi kebutuhan ASN pada satu tahun anggaran yang sama yaitu CPNS atau PPPK dan tidak dapat melamar keduanya.

2. Cara Pendaftaran

- a. Pelamar melakukan pendaftaran online melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau sesuai NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK), mengunggah **pas photo formal berlatar belakang merah berukuran maksimal 200 kb dengan format**

JPG/JPEG dan mencetak **Kartu Informasi Akun SSCASN 2024**;

- b. Pelamar masuk / login ke website <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, kemudian mengunggah **foto diri/selfi dengan memegang KTP dan Kartu Informasi Akun SSCASN 2024**.
- c. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan dengan menggunakan **scan dokumen asli, dan harus terbaca dengan jelas serta tidak terpotong** pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> meliputi:
 - 1) Scan KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - 2) Scan Pas foto menggunakan pakaian formal **terbaru, berwarna**, berukuran maksimal 200 kb dengan **latar belakang merah**;
 - 3) Scan Surat Pernyataan 5 poin yang **diketik** menggunakan komputer sesuai dengan persyaratan yang **ditandatangani** oleh pelamar dan dibubuhi **E-Meterai** (format terlampir);
 - 4) Scan Surat Pernyataan Tidak Pindah Penempatan yang **diketik** menggunakan komputer sesuai dengan persyaratan yang **ditandatangani** oleh pelamar dan dibubuhi **E-Meterai** (format terlampir);
 - 5) Scan Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan yang **ditandatangani** oleh pelamar dan dibubuhi **E-Meterai**, dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur c.q Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 di Samarinda, **diketik** menggunakan komputer, dengan dibubuhi **E-Meterai** (format terlampir);
 - 6) Scan **Ijazah asli** sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat Penyetaraan Ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri,
 - 7) Scan **Transkrip/Daftar nilai asli** atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek; dan
 - 8) Scan Asli dokumen pendukung lainnya:
 - i. Sertifikat atau Tangkapan Layar (*screenshot*) akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan;
 - ii. **Surat Keterangan Bebas Buta Warna** dari Puskesmas / Rumah Sakit / Fasilitas Kesehatan lain milik pemerintah dan/atau dokter pemerintah bagi jabatan **Polisi Kehutanan**;
 - iii. Pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan Jenis dan Derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar;
 - c. Link video singkat tersebut diatas disampaikan kepada panitia melalui laman form <https://bit.ly/FormDisabilitasCASN2024>.

- d. Pelamar **memastikan** seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah **lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca** (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai dapat mengakibatkan **pelamar tidak lulus** seleksi administrasi).

D. PELAKSANAAN SELEKSI

Seleksi pengadaan CPNS tahun 2024 terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu

1. **Seleksi Administrasi** dilakukan dengan mencocokkan persyaratan administratif dan kualifikasi pendidikan dengan dokumen pelamaran, Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah.

- a. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
- b. Panitia penyelenggara Seleksi akan mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka;
- c. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar.
- d. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- e. Panitia akan melakukan verifikasi sanggah kembali dokumen sesuai dengan sanggahan peserta;
- f. Panitia melakukan Jawab Sanggah sesuai dengan hasil verifikasi sanggah pada pada aplikasi SSCASN;
- g. Panitia akan mengumumkan kembali hasil seleksi administrasi pasca sanggah secara terbuka.

2. **Seleksi Kompetensi Dasar** menggunakan sistem CAT BKN, Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 memuat:

- 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
- 2) Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
- 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Ketentuan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 tercantum pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 321 Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- a. 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
- b. 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
- c. 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.

Peserta yang dinyatakan lulus adalah yang memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan.

Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Bagi pelamar Jabatan Fungsional Kehutanan wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan yaitu Tes Kesegaran Jasmani atau Kesamaptaan.

3. Seleksi Kompetensi Bidang

a. Seleksi Kompetensi Bidang menggunakan CAT BKN

Seleksi Kompetensi Bidang menggunakan CAT BKN sesuai dengan bidang tugas pada jabatan yang dilamar oleh masing-masing pelamar.

b. Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan non-CAT BKN

Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan Non-CAT BKN yang dilaksanakan berupa Tes Kesegaran Jasmani atau Kesamaptaaan bagi pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Polisi Pamong Praja.

Pokok Substansi Tes Kesegaran Jasmani atau Kesamaptaaan dalam Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan terdiri atas :

1. Tinggi Badan dan Berat Badan;
2. Kecakapan Anggota Tubuh;
3. Ketahanan dan kecepatan lari dalam kurun waktu tertentu;
4. Ketahanan Pull up/Chinning up dalam jumlah dan waktu tertentu;
5. Ketahanan sit up dalam jumlah dan waktu tertentu;
6. Ketahanan Push up dalam jumlah dan waktu tertentu; dan
7. Ketahanan dan kecepatan Shuttle run dalam jarak dan waktu tertentu;

Ketentuan Pelaksanaan Tes Kesegaran Jasmani atau Kesamaptaaan ialah sebagai berikut :

a) Tes Kesegaran Jasmani atau Kesamaptaaan dimulai dengan pemeriksaan kesehatan jasmani dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Pengukuran Tinggi Badan dan Berat Badan;
- ✓ Tes Buta Warna bagi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
- ✓ Tes Tekanan Daerah.

b) Hasil pemeriksaan kesehatan dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan ujian kesamaptaaan, adapun Ujian Kesamaptaaan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Samapta A : Lari 12 menit;
- b) Samapta B : *Pull-Up/Chinning-UP* 1 Menit, *Sit-Up* 1 Menit, *Push-Up* 1 Menit dan *Shuttle Run* 3x10 Meter.

c) Kriteria Tes Kesegaran Jasmani yang dapat menggugurkan peserta ialah sebagai berikut :

- ✓ Calon Polisi Pamong Praja Tinggi Badan kurang dari 160 cm untuk pria dan Tinggi Badan Kurang dari 155 cm untuk wanita;
- ✓ Calon Polisi Kehutanan Tinggi Badan kurang dari 165 cm untuk pria dan Tinggi Badan Kurang dari 160 cm untuk wanita;

d) Bobot Nilai Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan adalah 40% dari total keseluruhan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

4. Kriteria Kelulusan

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi Pengadaan CPNS 2024 ialah pelamar yang dinyatakan berperingkat terbaik setelah pengolahan Integrasi Hasil Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai kebutuhan formasi jabatan yang dilamar.

Daftar nama pelamar yang dinyatakan lulus akan disampaikan oleh Panitia Seleksi Instansi pada Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak diumumkan.

E. JADWAL SELEKSI

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA. 2024, berikut adalah Jadwal Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024.

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus – 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus – 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus – 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 – 17 September 2024
5	Masa Sanggah	18 – 20 September 2024
6	Jawab Sanggah	18 – 22 September 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 – 27 September 2024
8	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 – 15 Oktober 2024
9	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober – 14 November 2024
10	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	17 – 19 November 2024
11	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November – 17 Desember 2024
12	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 – 8 Desember 2024
13	Pelaksanaan SKB CPNS	9 – 20 Desember 2024
14	Integrasi Hasil SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 – 4 Januari 2025
15	Pengumuman Hasil CPNS	5 – 12 Januari 2025
16	Masa Sanggah	13 – 15 Januari 2025
17	Jawab Sanggah	13 – 19 Januari 2025
18	Pengumuman Pasca Sanggah	16 – 22 Januari 2025
19	Pengisian DRH	23 Januari – 21 Februari 2025
20	Usul Penetapan NIP CPNS	23 Februari – 23 Maret 2025

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan di umumkan kemudian melalui website : www.bkd.kaltimprov.go.id

D. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
2. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait proses pendaftaran seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 melalui menu *help desk* pada <https://helpdesk.kaltimbkd.info> dengan memilih fitur CPNS T.A 2024;
3. Media Sosial resmi BKD Prov. Kaltim:
 1. Website : www.bkd.kaltimprov.go.id
 2. Instagram : @bkdprovinsikaltim
 3. Facebook : BKDPROVKALTIM
4. Panitia dapat menggugurkan kelulusan peserta apabila ditemukan kecurangan dan/atau dokumen tidak asli dan/atau dokumen tidak linear dengan formasi yang dilamar pada saat pelamaran dan proses seleksi;

5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta itu sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan Tindakan penipuan dan kepada para peserta dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila ketahuan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui dan apabila ada kekeliruan dalam pengumuman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal: 19 Agustus 2024

